

# DANA DESA DAN UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN: STUDI KASUS JAWA TENGAH

<sup>1</sup>Trian Gigih Kuncoro\*, <sup>2</sup>Muhammad Arif, <sup>3</sup>Yulistya Primadani, <sup>4</sup>Wawan Kurniawan  
<sup>1,2,3</sup>Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta, <sup>4</sup>Badan Perencanaan  
Pembangunan Daerah Kab. Sragen

Jl. Ahmad Yani, Kartasura, Surakarta 57162, Jawa tengah, Indonesia

Jl. Sukowati, Karang Duwo, Kec. Sragen, Sragen 57211, Jawa Tengah, Indonesia

<sup>2</sup>ma104@ums.ac.id

\*Corresponding author: tgk106@ums.ac.id

## Abstrak

Penelitian ini berfokus pada kemiskinan, masalah kemiskinan yang tidak dapat dihindari oleh setiap negara bahkan di negara maju terlebih di negara yang masih berkembang seperti Indonesia. Objektifitas utama dalam penelitian ini yaitu investigasi dampak dana desa terhadap kemiskinan masyarakat Jawa Tengah. Pertumbuhan ekonomi regional (PDRB) dan keberhasilan pembangunan kualitas hidup (IPM) ditambahkan ke dalam penelitian, bertujuan menghilangkan hasil estimasi yang terlalu optimis. Penelitian ini menggunakan alat analisis data panel. Data cross section yang digunakan ada 29 kabupaten dan time series sebanyak 5 periode (2016-2020). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemiskinan dipengaruhi oleh dana desa, hubungan tersebut menunjukkan hubungan negatif. Data PDRB memiliki hubungan positif terhadap kemiskinan, IPM tidak menunjukkan pengaruh terhadap kemiskinan. Penelitian ini menambahkan pemahaman tentang hubungan antara kemiskinan, dana desa, PDRB, dan IPM di tingkat provinsi. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya kebijakan yang lebih akurat dalam alokasi dana desa dan perhatian yang lebih pada pertumbuhan ekonomi regional untuk mengurangi kemiskinan.

**Kata Kunci:** Dana Desa, PDRB, Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, Kemiskinan

## Abstract

This study focuses on poverty, an issue that affects every country, including developing ones like Indonesia. The primary objective is to investigate the impact of village funds (dana desa) on poverty in Central Java. Regional economic growth (PDRB) and the success of human development (IPM) are included in the research to provide a more balanced assessment. The research employs a data panel analysis with data from 29 districts over five periods (2016-2020). The findings reveal that poverty is influenced by village funds, showing a negative relationship. PDRB has a positive association with poverty, while IPM does not affect poverty levels. This study enhances our understanding of the connections between poverty, village funds, PDRB, and IPM at the provincial level. The implications of this research underscore the need for more precise policies in allocating village funds and a stronger focus on regional economic growth to alleviate poverty.

**Keywords:** Village Fund, PDRB, Economy Growth, IPM, Poverty

## PENDAHULUAN

Kemiskinan sering kali berkaitan dengan perilaku-perilaku yang terkesan irasional dan kontraproduktif (Jan de Bruijn & Antonides, 2022), mulai dari berulang kali

meminjam di pinjaman online dengan bunga tinggi, serta menghabiskan sebagian besar uangnya untuk rokok dan alkohol. Didefinisikan perilaku-perilaku tersebut lebih cenderung memenuhi kebutuhan non-primer. Perilaku tersebut sebagian besar disebabkan oleh rendahnya sumberdaya manusia (*human capital*). Sumberdaya yang erat kaitannya dengan tingkat pendidikan seseorang (Lusardi & Mitchell, 2014).

Kemiskinan merupakan suatu masalah yang dihadapi semua negara, baik negara maju maupun negara sedang berkembang, Indonesia salah satunya. Pada tahun 2021, ada sekitar 27,5 juta jiwa yang termasuk ke dalam kategori miskin di Indonesia atau 10 persen lebih masyarakatnya masih berada di bawah garis kemiskinan. Tahun 2021, Jawa Tengah berkontribusi sebesar 14,5 persen pada jumlah kemiskinan tersebut. Provinsi ini tercatat sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi ke dua di pulau Jawa, setelah Yogyakarta. Penyelesaian masalah kemiskinan harus dimulai dari ruang lingkup terkecil dari suatu negara. Ini dapat dimulai dengan menggunakan strategi kebijakan yang berfokus pada populasi miskin terbanyak (Faulana & Murniawaty, 2021) dengan kata lain, sesuai dengan bagian yang mereka ambil.

Penelitian mengenai kemiskinan telah banyak dibahas oleh para peneliti. Beberapa membahas mengenai dampak dari kemiskinan, yaitu berdampak pada pendidikan (Buck & Deutsch, 2014), mobilitas tenaga kerja (Pratiwi, Ashar & Syafitri, 2020), sistem dalam keluarga (Banovcinova, Levicka & Veres, 2014), sistem biologis (Jensen, Berens & Nelson, 2017), kondisi lingkungan (Baloch, Danish, Khan, Ulucak & Ahmad, 2020), hingga berdampak pada lingkup makro sosial (Wei, Zhong, Song & Huang, 2023).

Beberapa membahas mengenai penyebab kemiskinan, seperti Brady (2019) yang membagi tiga pandangan penyebab kemiskinan, seperti perilaku, struktural, dan politik. Penyakit menular dan sanitasi yang buruk juga memiliki kontribusi dalam peningkatan angka kemiskinan (Anser et al., 2020). Pertumbuhan ekonomi pada awalnya memang dapat menurunkan angka kemiskinan akan tetapi ada fase dimana pertumbuhan ekonomi tersebut memberikan kesenjangan dalam fasilitas kesehatan yang pada akhirnya memberikan peningkatan dalam angka kemiskinan, berbentuk U (Anser et al., 2020).

Beberapa peneliti berusaha menyintesis rumusan akademis yang tepat untuk mengurangi tingkat kemiskinan yang berdampak pada setiap aspek kehidupan. Strategi pengentasan kemiskinan dapat dilakukan dengan pengutatan pada sektor pembiayaan mikro berbasis organisasi masyarakat, berbasis kapabilitas dan jaminan sosial, berbasis pasar, dan tata kelola yang baik (Liu, Feng, Wang & Qiu, 2020; Singh & Chudasama, 2020). Pada sektor lain pengentasan kemiskinan dapat dilakukan dengan asetisasi tanah (Guo & Liu, 2021), industrialisasi kelompok tani (Liu, Feng, Wang & Zhong, 2021), dan melalui program CSR (*Corporate Social Responsibility*) perusahaan (Medina-Muñoz & Medina-Muñoz, 2020).

Indonesia memiliki cara lain yang berbeda dalam penurunan angka kesmiskinan, yaitu dengan dana desa. Keseluruhan dana desa memiliki korelasi dengan penurunan tingkat kemiskinan (Angga & Kosasih, 2020). Hasil ini terlalu optimis jika menyamakan untuk setiap kondisi daerah tanpa melihat bagaimana kinerja kepala desa, bagaimana pemanfaatannya yang berorientasi pada kemiskinan atau berapa persen yang dialokasikan untuk ini, kondisi politik dalam desa tersebut, korupsi (Manihuruk, 2021) dan sebagainya. Dana desa yang diberikan ke salah satu kecamatan di provinsi Bali tepat di kabupaten Kepulauan Talaud tidak berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan, hal ini menjadi salah satu contohnya (Lalira, Nakoko & Pingkan, 2018).

Tinjauan terhadap penelitian terkait dana desa masih terbatas dan memberikan hasil yang bervariasi. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini diperlukan untuk



Teori lingkaran kemiskinan, oleh Ragnar Nurkse (1961), mengatakan bahwa kemiskinan tidak dapat diselesaikan dengan mudah, akibat dari keterkaitan antara aspek permintaan, penawaran, dan sumber daya (Nurkse, Kattel, Kregel & Reinert, 2009). Pada praktiknya kemiskinan tidak mudah untuk diatasi oleh karena kemiskinan merupakan suatu siklus yang saling terhubung, sebagaimana yang pernah digambarkan oleh Kuncoro (2006) pada Gambar 1.

### **Dana Desa**

Dana Desa merupakan dana APBN yang disediakan oleh pemerintah pusat kepada pemerintahan tingkat desa. Dana Desa ditransfer melalui rekening APBD Kabupaten/Kota. Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan penguatan masyarakat sebagaimana yang tertuang pada Peraturan Pemerintah No. 60/2014. Pasal 11 ayat (1) PP Nomor 22 Tahun 2015, perubahan atas peraturan sebelumnya, menyebutkan bahwa dana desa diperhitungkan berdasarkan jumlah desa dalam satu Kabupaten/Kota. Pada pasal lainnya dalam peraturan yang sama, disebutkan bahwa dana desa didistribusikan secara adil berdasarkan alokasi intri, hibah dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk di desa, angka kemiskinan suatu wilayah, dan kondisi geografis masing-masing kabupaten/kota (Rahayu, 2019).

Keberadaan Dana Desa secara umum tidak terlepas dari dua motivasi. Pertama, Dana Desa sebagai intensi pemerintah dalam meningkatkan permintaan domestik (Jarvis, 2002). Kedua, adanya hambatan kredit (*credit constrains*) yang dihadapkan kepada masyarakat pedesaan. Masyarakat ini cenderung memiliki keterbatasan pada akses institusi pembiayaan. Adanya hambatan tersebut, Dana Desa mampu berperan sebagai alat mitigasi *credit constrains* dalam mengatasi kemiskinan (Menkhoff & Rungruxsirivorn, 2011).

### **Indeks Pembangunan Manusia**

Pembangunan manusia pada dasarnya tidak terlepas dari premis yang terbentuk, antara lain pembangunan menjadikan penduduk sebagai pusat perhatian. Kedua, pembangunan dimaksudkan untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi penduduk. Ketiga, pembangunan manusia tidak hanya berfokus pada upaya meningkatkan kemampuan manusia, tetapi berupaya dalam memanfaatkan kemampuan secara optimal. Untuk mengukur keberhasilan pembangunan manusia tersebut, penggunaan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) telah menjadi indikator yang relevan.

*Human Development Report* (HDR) memperkenalkan tiga dimensi pembentuk dalam IPM yaitu, umur panjang, hidup sehat, tingkat pengetahuan, dan standar hidup layak. Ketiga dimensi tersebut diwakilkan oleh empat indikator perhitungan, yaitu Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH), Angka Melek Huruf (AMH), Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita. Di Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai institusi yang menyediakan perhitungan indikator IPM. Saat ini, indikator pada IPM mengalami perubahan, antara lain, Angka Melek Huruf (AMH) dan kombinasi Angka Partisipasi Kasar (APK) diubah menjadi, masing-masing, Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Kedua, PDB per kapita diubah menjadi Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita (BPS, 2020).

## **Pertumbuhan Ekonomi/PDRB**

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah kegiatan ekonomi di seluruh wilayah dan merupakan bentuk penjumlahan dari nilai tambah barang dan jasa (Siti, Nur & Karim, 2017). PDRB kemudian telah menjadi indikator yang mampu menggambarkan pertumbuhan perekonomian suatu negara.

Perhitungannya PDRB terbagi menjadi tiga pendekatan. Pertama, pendekatan produksi merupakan penjumlahan dari nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi. Kedua, pendekatan pendapatan merupakan penjumlahan balas jasa faktor-faktor produksi dalam proses produksi suatu daerah pada waktu tertentu. Ketiga, pendekatan pengeluaran terdiri dari beberapa komponen, yaitu pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap, perubahan inventori, ekspor neto.

## **Penelitian Terdahulu**

Pada bagian ini kami menjelaskan lebih lanjut tentang dana desa, bagaimana hubungannya terhadap tingkat kemiskinan, dan penggunaan dana desa tersebut yang bersumber dari hasil kajian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu.

Yulitasari dan Tyas (2020) meneliti hubungan antara dana desa dengan kondisi desa yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Menurut Yulitasari dan Tyas (2020), status desa sangat dipengaruhi oleh keberadaan dana desa. Penelitian tersebut menegaskan pengaruh tersebut tidak lebih besar dari faktor selain kas desa terhadap kondisi desa.

Menurut Hermawan, Istiqomah, dan Ahmad (2021) hubungan antara dana dengan kemiskinan merupakan hubungan yang negatif. Temuan tersebut kemudian didukung oleh Ratwianingsih, Bintariningtyas, dan Mulyaningsih (2021) dengan menggunakan metode *path analysis*. Mereka berpendapat dana desa berhubungan langsung terhadap penurunan kemiskinan. Kaitannya terhadap kesejahteraan, justru dana desa tidak memberikan pengaruh langsung.

Rachma, Somaji, dan Kustono (2019) berpendapat kebijakan dana desa yang menawarkan perspektif baru tentang perubahan pola pembangunan ekonomi. Kontribusi dana desa dapat menyelesaikan masalah kemiskinan dan ketimpangan pendapatan di desa. Sejalan dengan hal tersebut, Agustanta, Ningtyas, dan Payamta (2017) pada penelitian yang mengaplikasikan model data panel menarik kesimpulan bahwa alokasi dana desa berdampak negatif terhadap angka kemiskinan. Hal ini menunjukkan peningkatan dana alokasi desa akan menurunkan garis kemiskinan.

Joetarto, Setiawan, dan Farida (2020), pada penelitiannya yang membahas dana desa dengan kesejahteraan masyarakat dengan menggunakan analisis deskriptif, menemukan bahwa secara rata-rata tingkat kesejahteraan di seluruh Indonesia telah meningkat yang dapat dibuktikan dengan konsumsi per kapita yang meningkat akibat dari keberadaan dana desa. Pengeluaran perkapita tersebut meningkat dari Rp. 781.607,70 pada tahun 2014 menjadi Rp. 892.775,50 pada tahun 2017 dan meningkat sebesar Rp. 81.918,2 menjadi Rp. 974.693,70 di tahun berikutnya.

Daforsa dan Handra (2019) meneliti tentang manajemen dari dana desa dan pengaruhnya terhadap kemiskinan. Penelitian tersebut menggunakan data panel dengan sampel kabupaten-kabupaten di Sumatera Barat. Daforsa dan Handra (2019) berpendapat bahwa pendanaan pedesaan untuk sektor publik sangat minim, penggunaan dana desa di daerah lebih bersifat operasional dan pendukung saja.

Berbeda dengan penelitian yang lain, Sulila (2020) pada penelitiannya memperoleh kesimpulan bahwa adanya kebijakan dana pada 4 tahun kebelakang belum dapat

mengurangi kemiskinan. Peningkatan keterlibatan aktif masyarakat dalam inisiatif (menerapkan, menyetujui, mengontrol dan penilaian dana desa). Penyusunan kembali dana desa agar terukur dan dapat menjangkau hingga dasar, menyiapkan SDM sebagai tim pelaksana dana desa, menciptakan program yang inovatif serta produktif untuk mengurangi kemiskinan, dan memastikan akses utilitas dianggap sebagai strategi yang mampu mengurangi tingkat kemiskinan.

Arif, Hasmarini, Wulandari, dan Sofyan (2020) meneliti topik rasio yang membentuk angka kemiskinan di salah satu kabupaten di Jawa Tengah, yaitu Kabupaten Sragen. Mereka menemukan kesimpulan bahwa *dependency ratio* dan rasio disparitas tidak terdapat andil dalam pembentukan kemiskinan. Aksesibilitas yang nyata justru dapat mempengaruhi kemiskinan di regional tersebut. Pada penelitian yang lain, Arif et. al, (2019) menemukan wilayah (dalam hal ini lokasi) berpengaruh terhadap terjadinya penumpukan kemiskinan di Kabupaten Sragen.

Penelitian yang dilakukan Prasetyoningrum dan Sukmawati (2018) berfokus pada hubungan kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia menunjukkan pengaruh negatif. Mereka berpendapat bahwa IPM yang meningkat dapat menambah produktivitas, sehingga berdampak pada penambahan pendapatan. Selain itu, penelitian ini menemukan hubungan yang sama pada pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan.

Isa, Arham, dan Dai (2019) menggunakan pendekatan Data Panel dalam penelitiannya yang berfokus pada indeks pembangunan terhadap kemiskinan, menemukan hubungan negatif antara indeks pembangunan dan tingkat kemiskinan. Penelitian tersebut menggunakan kabupaten-kabupaten yang terdapat di Provinsi Gorontalo sebagai sampel penelitian.

Menurut Subianto (2018) dalam penelitiannya di Musi Rawas, pertumbuhan ekonomi melalui indikator PDRB tidak berpengaruh terhadap angka penduduk miskin. Penelitian ini juga menemukan bahwa angka kemiskinan tidak dipengaruhi oleh Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu yang telah dikemukakan, maka didapatkan beberapa hipotesis yang dapat dikonstruksikan. Hipotesis tersebut yaitu, Dana Desa memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan, PDRB berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan, IPM memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian merupakan penelitian kuantitatif. Penelitian ini menghitung secara matematis dan statistik dari teori ekonomi yang digunakan. Metode yang digunakan untuk mengestimasi hubungan kausalitas antar variabel dependen dan independen adalah metode data panel. Ruang lingkup penelitian ini terbatas pada hubungan kemiskinan, dana desa, pertumbuhan ekonomi daerah, dan keberhasilan pembangunan kualitas hidup masyarakat di 29 kabupaten di Jawa Tengah. Data merupakan data gabungan antara *cross section* (29 kabupaten) dan *time series* (dari 2016 hingga 2020). Pemilihan tahun mulai didasarkan atas realisasi program Dana Desa hingga tahun 2020 dimana Indonesia secara umum belum terjadi kerugian atas pandemi Covid-19. Hal ini kami lakukan untuk menjaga konsistensi data dalam keadaan normal. Data penelitian merupakan data kuantitatif yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan dinas terkait masyarakat dan perdesaan (Dispermasdukcapil) yang berlokasi di Jawa Tengah.

Variabel yang diuji dalam penelitian ini yaitu, Kemiskinan (persen), PDRB (juta rupiah), IPM (indeks skala 1-100), dan Dana Desa (ribu rupiah). Adapun model yang diaplikasikan dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$POV_{it} = \beta_0 + \beta_1 \log(DD)_{it} + \beta_2 \log(PDRB)_{it} + \beta_3 \log(IPM)_{it} + e_{it} \quad \dots\dots\dots(1)$$

POV merupakan variabel tingkat kemiskinan, DD merupakan dana desa, PDRB akronim produk domestik regional bruto yang merupakan proksi dari pertumbuhan ekonomi daerah, dan keberhasilan pembangunan kualitas hidupp masyarakat yang diindikatori oleh indeks pembangunan manusia (IPM).  $\beta_0, \beta_1, \beta_2, \beta_3$  masing masing merupakan konstanta/koeffisien setiap variabel yang diuji. Subskrip i dan t masing-masing merupakan unit *cross-section* dan *time series* setiap variabel yang diteliti. Selain itu, e merupakan *error term* dalam model penelitian.

Pendekatan data panel dipilih karena sifatnya yang lebih dekat kepada *cross section* yang mampu menyelesaikan permasalahan asumsi klasik, sehingga memungkinkan hasil yang lebih kuat dari pada OLS. Pendekatan Data Panel yang digunakan memiliki langkah-langkah yang harus ditempuh sebelum dilakukannya estimasi. Langkah-langkah tersebut diawali dengan penentuan jenis model yang terbaik untuk diestimasi. Apakah *Common Effect Model (CEM)* yang terbaik untuk diaplikasikan? Apakah *Fix Effect Model (FEM)* yang terbaik? atau *Random Effect Model* yang merupakan model paling efektif? Kami menggunakan pendekatan Chow (uji komparasi model CEM dan FEM) dan Hausman (uji komparasi model FEM dan REM) dalam menentukan model terbaik tersebut. Kemudian, model yang terbaik diestimasi dengan pendekatan regresi dan diinterpretasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi oleh seluruh negara, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Hal ini karena bersifat multidimensional, artinya kemiskinan memiliki banyak aspek primer berupa kemiskinan aset, organisasi sosial, politik, pengetahuan dan keterampilan serta aspek sekunder berupa kemiskinan karena perbedaan kebutuhan, kemiskinan jaringan sosial, sumber daya keuangan dan informasi (Suripto & Subayil, 2020)

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah sebanyak 3.980,90 ribu jiwa pada tahun 2020. Angka kemiskinan di 29 kabupaten di Provinsi Jawa Tengah mengalami tren penurunan selama 2016-2019. Pada tahun 2020 angka kemiskinan kembali naik karena adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan banyak masyarakat kehilangan mata pencaharian tetapnya. Pada tahun 2020 angka kemiskinan tertinggi berada di Kabupaten Kebumen yaitu sebesar 17,59 persen. Hal ini dikarenakan pengaruh dari pandemi Covid-19. Pada kabupaten dengan angka kemiskinan terendah pada tahun 2020 berada di Kabupaten Jepara yaitu sebesar 7,17 persen. Kabupaten Jepara memiliki beberapa sektor terpenting yang dapat menunjang perekonomian, ketiga sektor tersebut yaitu pengolahan, pertanian, perdagangan dan pengelolaan perikanan (Tampubolon & Satria, 2013). Kabupaten Wonosobo selama tahun 2016 hingga 2018 memiliki persentase penduduk miskin tertinggi. Pada tahun 2016 penduduk miskin di Kabupaten Wonosobo sebesar 20,53 persen. Pada tahun 2017 angka tersebut turun, tetapi tetap menjadi yang tertinggi di Provinsi Jawa Tengah dengan persentase sebesar 20,32 persen. Kemudian angka tersebut kembali turun sebesar 17,58

persen pada tahun 2018. Hal ini disebabkan di Kabupaten Wonosobo banyak keluarga yang tinggal di permukiman kumuh, serta banyaknya keluarga yang menderita gizi buruk (Permana, Yasin, & Rusgiyono, 2013).

Untuk mambantu mengatasi kesenjangan fasilitas dan tingkat kemiskinan, pemerintah pusat kemudian melakukan injeksi dana kepada pemerintah desa. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa tengah mencatat penyaluran Dana Desa di 29 kabupaten cukup beragam. Pada tahun 2020 Kabupaten Brebes mendapatkan penyaluran Dana Desa tertinggi sebanyak Rp. 495.634.148.000, hal ini dikarenakan Kabupaten Brebes memiliki 292 desa. Pada tahun 2018, penyaluran dana desa Kabupaten Brebes, tepatnya di desa Cinanas digunakan untuk merealisasikan bantuan anak kurang mampu, kejar paket A, B, C, serta pembelian alat peraga edukatif paud. Adapun dana yang didapatkan Kabupaten Brebes pada tahun 2018 sebesar Rp. 344.197.496.000 (Faturrohman, Muhdi & Abdullah, 2020). Kabupaten Sukoharjo mendapatkan anggaran dana desa terendah pada tahun 2020 sebesar Rp. 146.662.487.000. Hal ini dikarenakan desa-desa di Kabupaten Sukoharjo sudah mandiri. Alokasi Dana Desa (ADD) dapat digunakan untuk mengelola pembangunan sebagai wujud pemenuhan hak desa agar tumbuh serta berkembang (Muchtolifah & Eliza, 2020).

Jika melihat dari sisi pertumbuhan ekonominya, perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan menurut kabupaten Di Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2016-2020. Selama tahun 2016 hingga tahun 2020 Kabupaten Cilacap menjadi kabupaten dengan tingkat PDRB tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Pada tahun 2019 PDRB di Kabupaten Cilacap sebesar Rp. 100.327.298,90. Pada tahun 2020 PDRB Kabupaten Cilacap mengalami penurunan sebesar Rp. 10.315.714,80 menjadi Rp. 90.011.584,10. Tingginya PDRB di Kabupaten Cilacap dikarenakan adanya tambang minyak, tambang migas yang dapat membantu perekonomian. Kabupaten Cilacap juga memiliki pemanfaatan sumber daya perairan Segara Anakan (Triyanti, Wijaya, Koeshendrajana & Priyatna, 2010).

Kabupaten Purworejo menjadi kabupaten dengan tingkat PDRB terendah. Pada tahun 2020 PDRB Kabupaten Purworejo sebesar Rp. 13.138.294,11, angka pada tahun tersebut juga mengalami penurunan sebesar Rp. 215.042,22 dari tahun 2019. Rendahnya PDRB di Kabupaten Purworejo pada tahun 2020 disebabkan oleh pandemi yang melanda Indonesia, sehingga aspek-aspek perekonomian menurun, selain itu kurang meratanya pembangunan pada beberapa sektor, sehingga PDRB kurang berkembang atau bahkan tidak berkembang (Muchtolifah & Eliza, 2020).

Hal ini sejalan dengan Indeks Pembangunan Manusia di provinsi tersebut. IPM di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2016 hingga 2020 terus mengalami peningkatan dan kemajuan. Pada tahun 2020 IPM pada Kabupaten Sukoharjo sebesar 76,98. Adanya pengembangan sumber daya manusia di Kabupaten Sukoharjo menjadikan daerah ini memiliki kualitas indeks yang baik. Kabupaten Brebes menjadi kabupaten dengan nilai IPM terendah pada tahun 2020 yaitu sebesar 66,11. Hal ini dikarenakan penduduk di Kabupaten Brebes memiliki tingkat harapan hidup yang rendah, dengan rata rata sekitar 67 tahun (Supadi & Pudjianto, 2011).

Pengujian menggunakan kaidah Uji Chow. Hasil Uji Chow menunjukkan nilai prob. lebih kecil dari signifikansi 5 persen ( $< 0.05$ ),  $H_0$  ditolak. Hasil tersebut menunjukkan model *Fixed Effect Model* (FEM) merupakan model terbaik untuk digunakan (Tabel 1). Berdasarkan uji Hausman menunjukkan hasil yang sama, yaitu FEM sebagai model yang terbaik.

**Tabel 1. Hasil Uji Chow dan Hausman**

Nama Pengujian	F-statistik	d.f.	Prob.
Chow	6.074728	28,113	0.0000
Hausman	13,176912	3	0.0043

Setelah uji F dilakukan untuk mengetahui eksistensi suatu model, diperoleh nilai signifikansi  $F < 0,01$ , yang menunjukkan bahwa  $H_0$  ditolak. Dapat disimpulkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Dana Desa (DD) secara bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan (POV). Hanya PDRB dan DD yang memiliki pengaruh parsial terhadap kemiskinan.

Hasil statistik (Tabel 2), dana desa berdampak negatif terhadap tingkat kemiskinan pada tingkat signifikansi 5%. Ini menunjukkan bahwa seiring peningkatan dana desa, angka kemiskinan akan turun. Terdapat penurunan terhadap dana desa maka akan meningkatkan angka kemiskinan. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian sebelumnya seperti Angga dan Kosasih (2020); Daforsa dan Handra (2019); Joetarto et al. (2020); Agustanta et al. (2017), dan (Hermawan & Wiagustini, 2016).

**Tabel 2. Hasil Estimasi *Fix Effect Model***

Variabel	FEM	
	Koefisien	Prob
C	-225969,6	0,0339
LOG(DD)	-4651,375	0,0434
LOG(PDRB)	16690,17	0,0667
IPM	5,180386	0,5037
<i>R-squared</i>	0,651369	
<i>Adj. R</i>	0,555727	
<i>F-statistic</i>	6,810491	
<i>Prob (F-Statistic)</i>	0,000000	

PDRB juga memiliki pengaruh terhadap angka kemiskinan ( $\text{sig} < 0.1$ ). Secara statistik menunjukkan pengaruh positif, sejalan dengan Anser et al. (2020). Hal ini tentu tidak seperti yang diharapkan, peningkatan ekonomi regional yang seharusnya merupakan representasi dari kemakmuran masyarakat justru dapat meningkatkan angka kemiskinan Rachma et al., 2019; Prasetyoningrum et.al 2018). Tingginya tingkat pengangguran dikombinasikan dengan pertumbuhan penduduk yang cukup pesat menyebabkan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Jika dilihat dari sisi Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT), selama masa pandemi Covid-19 memang mengalami peningkatan. Masyarakat yang kehilangan pekerjaan semakin meningkat, sehingga memperdalam tingkat kemiskinan.

Dana desa diharapkan dapat meningkatkan pembangunan di suatu wilayah karena pada dasarnya dana desa bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan tersebut tentu dapat dilakukan melalui yang utama pemberdayaan masyarakat secara jelas, pelaksanaan pembangunan yang berorientasi pada perekonomian, dan program kemasyarakatan yang menunjang kehidupan berkelanjutan, dengan begitu program dana desa optimis mampu menekan laju kemiskinan. Mengaca pada program-program perusahaan besar dalam mengelola dana CSR contohnya, dana yang digunakan secara efektif semata-mata hanya untuk pengembangan masyarakat terbukti mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dibina Purnamawati, Yuniarta dan Jie, (2023).

Pengalokasian dana desa untuk mengembangkan infrastruktur desa memang dapat mengurangi kemiskinan. Hal ini tidak memberikan dampak yang berarti dibandingkan dengan penggunaan dana desa yang bersifat non-infrastruktur (Boret, Gawande & Kobb, 2021). Penggunaan dana desa harus menyesuaikan informasi yang tersedia di desa tersebut dan memprioritaskan titik krusial kemiskinan.

## SIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dengan menggunakan metode data panel di kabupaten yang tersebar di Provinsi Jawa Tengah, yang mana dalam penelitian ini ada 29, menunjukkan hubungan negatif yang signifikan antara variabel independen dana desa dan variabel tingkat kemiskinan. Hal ini menunjukkan peningkatan proporsi dana desa secara teori mampu mengurangi tingkat kemiskinan. Kami juga menemukan bahwa variabel PDRB berdampak positif pada tingkat kemiskinan pada tingkat signifikansi 10%. Selain itu, kami juga menemukan bahwa variabel IPM tidak berdampak pada tingkat kemiskinan. Implikasi dari hasil tersebut yaitu penambahan porsi dana desa apabila dikelola dengan baik tentu akan berdampak positif bagi keberlangsungan hidup masyarakat Jawa Tengah. Peningkatan pendapatan per kapita dapat terwujud secara merata.

Penelitian ini menyarankan beberapa hal, seperti mengidentifikasi karakteristik wilayah berdasarkan informasi yang diperoleh atas desa, agar dana desa didistribusikan sesuai proporsi yang diperlukan. Pemerintah provinsi perlu melakukan pengawasan yang lebih ketat dalam pelaksanaan anggaran dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa, sehingga efektivitas dana desa dalam mengurangi angka kemiskinan semakin masif.

Penelitian ini tentu tidak terlepas dari suatu kekurangan maka dari itu, penelitian ini harus diperluas lebih jauh untuk meningkatkan kualitas penelitian, terutama tentang hubungan PDRB dan tingkat kemiskinan. Penambahan variabel kelembagaan juga dapat dilakukan. Hal ini bertujuan melihat sejauh mana efisiensi dan efektivitas yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustanta, N., Ningtyas, D. N., & Payamta, P. (2017). The effect of village funds allocation on poverty in Indonesia. *Social and Environmental Accounting & Ethical Issues in Accounting*, 4(11), 63-80.
- Angga, T. S., & Kosasih, A. (2020). Pengaruh dana desa terhadap kemiskinan: studi tingkat kabupaten/kota di Indonesia. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 5(2), 105–119. doi:10.33105/itrev.v5i2.170
- Anser, M. K., Yousaf, Z., Khan, M. A., Nassani, A. A., Alotaibi, S. M., Abro, M. M. Q., Vo, X. V., & Zaman, K. (2020). Does communicable diseases (including COVID-19) may increase global poverty risk? A cloud on the horizon. *Environmental Research*, 187(8), 2-13. doi:10.1016/j.envres.2020.109668.
- Arif, M., Hasmarini, M. I., Wulandari, A. P., & Sofyan, A. (2020). Rasio-rasio pembentuk angka kemiskinan di Kabupaten Sragen. *Prosiding University Research Colloquium* (pp. 315–323).
- Arif, M., Nugroho, S. P., Kurniawan, W., Wahyudi, W., Ulinuha, A., & Purwandari, E. (2019). Distribusi spasial masyarakat terkategori miskin dalam basis data terpadu

- Kabupaten Sragen. *Jurnal Litbang Sukowati: Media Penelitian dan Pengembangan*, 2(2), 97-112. doi: 10.32630/sukowati.v2i2.76.
- Baloch, M. A., Danish., Khan, S. U. D., Ulucak, Z. Ş., & Ahmad, A. (2020). Analyzing the relationship between poverty, income inequality, and CO<sub>2</sub> emission in Sub-Saharan African countries. *Science of the Total Environment*, 740(2020), 139867. doi:10.1016/j.scitotenv.2020.139867.
- Banovcinova, A., Levicka, J., & Veres, M. (2014). The impact of poverty on the family system functioning. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 132, 148–153. doi: 10.1016/j.sbspro.2014.04.291.
- Boret, N., Gawande, K., & Kobb, D. P. (2021). Can decentralization lower poverty? Cambodia's commune and Sangkat Fund. *World Development*, 146(2021), 105548. doi: 10.1016/j.worlddev.2021.105548.
- Brady, D. (2019). Theories of the causes of poverty. *Annual Review of Sociology*, 45, 155–175. doi:10.1146/annurev-soc-073018.
- Buck, R., & Deutsch, J. (2014). Effects of poverty on education. *Journal of Human Sciences*, 11(2), 1139-1148. doi:10.14687/ijhs.v11i2.3043.
- Chambers, R. (1984). *Rural development: putting the last first*. Longman. New York: United State.
- Daforsa, F., & Handra, H. (2019). Analysis of village fund management in poverty alleviation at Pasaman Regency, West Sumatra. *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, 6(6), 717–728. doi:10.22437/ppd.v6i6.6817.
- Faturohman, R., Muhdi, & Abdullah, G. (2020). Implementasi kebijakan biaya pendidikan dari dana desa di Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes. *Jurnal Manajemen Pendidikan (JMP)*, 8(1), 121–140. doi:10.26877/jmp.v8i1.5374.
- Faulana, I., & Murniawaty, I. (2021). Model pengentasan kemiskinan melalui kebijakan PKH di Jawa Tengah. *OIKOS Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi Dan Ilmu Ekonomi*, 5(2), 122-135. doi:10.23969/oikos.v5i2.3414.
- Guo, Y., & Liu, Y. (2021). Poverty alleviation through land assetization and its implications for rural revitalization in China. *Land Use Policy*, 105(2021), 105418. doi:10.1016/j.landusepol.2021.105418.
- Hermawan, A., Istiqomah, I., & Ahmad, A. A. (2021). the effect of village funds on rural poverty: Empirical evidence from Java Island. *International Conference on Rural Development and Entrepreneurship*, 5(1), 177–183.
- Hermawan, D., & Wiagustini, B. L. P. (2016). Pengaruh inflasi, suku bunga, ukuran reksa dana, dan umur reksa dana terhadap kinerja reksa dana. *E-jurnal Manajemen Unud*, 5(5), 3106–3133.
- Isa, D. P., Arham, M. A., & Dai, S. I. (2019). Effects of capital expenditures, development index and unemployment on poverty in Gorontalo Province. *Jambura Equilibrium Journal*, 1(1), 23-30. doi: 10.37479/jej.v1i1.1998.
- Jan de Bruijn, E., & Antonides, G. (2022). Poverty and economic decision making: a review of scarcity theory. *Theory and Decision*, 92(1), 5–37. doi: 10.1007/s11238-021-09802-7.
- Jarvis, D. S. L. (2002). Problems and prospects in Thaksin's Thailand: An interim assessment. *Asian Survey*, 42(2), 297–319. doi:10.1525/as.2002.42.2.297.
- Jensen, S. K. G., Berens, A. E., & Nelson, C. A. (2017). Effects of poverty on interacting biological systems underlying child development. *The Lancet Child and Adolescent Health*, 1(3), 225–239. doi:10.1016/S2352-4642(17)30024-X.

- Joetarto, B., Setiawan, A., & Farida, F. (2020). The impact of village fund program on improving well-being. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan*, 13(2), 345–366. doi:10.15294/jejak.v13i2.24395
- Lalira, D., Nakoko, A. T., & Pingkan, I. R. F. (2018). Pengaruh dana desa dan alokasi dana desa terhadap tingkat kemiskinan di Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 18(4), 62–72.
- Liu, M., Feng, X., Wang, S., & Qiu, H. (2020). China's poverty alleviation over the last 40 years: successes and challenges. *Australian Journal of Agricultural and Resource Economics*, 64(1), 209–228. doi:10.1111/1467-8489.12353.
- Liu, M., Feng, X., Wang, S., & Zhong, Y. (2021). Does poverty-alleviation-based industry development improve farmers' livelihood capital? *Journal of Integrative Agriculture*, 20(4), 915–926. doi:10.1016/S2095-3119(20)63449-9.
- Lusardi, A., & Mitchell, O. S. (2014). The economic importance of financial literacy: Theory and evidence. *Journal of Economic Literature*, 52(1), 5–44. doi:10.1257/jel.52.1.5.
- Manihuruk, T. N. S. (2021). Problematika penegakan hukum tindak pidana korupsi dana desa di Provinsi Riau. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 5(2), 290-314. doi:10.25072/jwvy.v5i2.389.
- Medina-Muñoz, R. D., & Medina-Muñoz, D. R. (2020). Corporate social responsibility for poverty alleviation: An integrated research framework. *Business Ethics A European Review*, 29(1), 3–19. doi:10.1111/beer.12248.
- Menkhoff, L., & Rungruxsirivorn, O. (2011). Do village funds improve access to finance? Evidence from Thailand. *World Development*, 39(1), 110–122. doi:10.1016/j.worlddev.2010.09.002.
- Muchtolifah, M. & Eliza, A. D. (2020). Analisis potensi daerah Purwomanggung (Kabupaten Purworejo). *Jurnal Ilmu Ekonomi Pembangunan*, 14(02), 69-84.
- Nurkse, R., Kattel, R., Kregel, J. A., & Reinert, E. S. (2009). *Ragnar Nurkse: Trade and Development*. Anthem Press: London.
- Permana, M. T., Yasin, H., & Rusgiyono, A. (2013). Analisis faktor-faktor tingkat kemiskinan di Kabupaten Wonosobo dengan pendekatan geographically weighted regression. *Jurnal Gaussian*, 2(1), 59–68. doi:10.14710/j.gauss.2.1.59-68
- Prasetyoningrum, A. K. & Sukmawati, U.S. (2018). Analisis pengaruh indeks pembangunan manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi dan pengangguran terhadap kemiskinan di Indonesia. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(2), 217-240. doi:10.21043/equilibrium.v6i2.3663.
- Pratiwi, E. D., Ashar, K., & Syafitri, W. (2020). Dampak kemiskinan terhadap pola mobilitas tenaga kerja antarsektor di Indonesia. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 15(1), 1-18. doi: 10.14203/jki.v15i1.473
- Purnamawati, I. G. A, Yuniarta, G. A., & Jie, F. (2023). Strengthening the role of corporate social responsibility in the dimensions of sustainable village economic development. *Heliyon*, 9(4), 1-12. doi:10.1016/j.heliyon.2023.e15115.
- Rahayu, S. (2019). Pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat desa di Desa Damit Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser. *E-Journal Ilmu Pemerintahan*, 7(4), 1681–1692.
- Rachma, D.D., Somaji, R. P., & Kustono, A. S. (2019). Government expenditure, poverty and income inequality in indonesia: New evidence from village funds. *International Journal of Scientific and Technology Research*, 8(8), 38–42.

- Ratwianingsih, L., Bintariningtyas, S., & Mulyaningsih, T. (2021). Can village fund improve community welfare in central java province? *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi*, 23(3), 475–481.
- Singh, P. K., & Chudasama, H. (2020). Evaluating poverty alleviation strategies in a developing country. *PLOS ONE*, 15(1), 1-23. doi:10.1371/journal.pone.0227176.
- Siti, M., Nur, I. M., & Karim, A. (2017). Pemodelan produk domestik regional bruto (PDRB) di Provinsi Jawa Tengah menggunakan regresi kuantil. *Jurnal Statistika*, 5(1), 52–59. doi:10.26714/jsunimus.5.1.2017.%25p
- Subianto, S. (2018). Pengaruh pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten Musi Rawas. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 3(2), 477–496. doi:10.32502/mti.v3i2.2071.
- Sulila, I. (2020). Village fund policy implementation model in efforts to reduce poverty rate. *MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 36(2), 440-449. doi:10.29313/mimbar.v36i2.6358
- Supadi, S & Pudjianto, H. (2011). Disparitas kualitas sumber daya manusia di 35 Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah. *Eko-Regional*, 6(2), 97–106. doi:10.20884/1.erjpe.2011.6.2.448
- Suripto, S & Subayil, L. (2020). Pengaruh tingkat pendidikan, pengangguran, pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia terhadap kemiskinan di D.I.Yogyakarta periode 2010-2017. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, 1(2), 127–143.
- Tampubolon, F. L., & Satria, A. (2013). Hubungan antara nelayan Jepara dan Karimunjawa dalam memanfaatkan sumberdaya perikanan di Taman Nasional Karimunjawa. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 1(3), 200–205.
- Triyanti, R., Wijaya, R. A., Koeshendrajana, S., & Priyatna, F. N. (2010). Karakteristik dan nilai manfaat langsung sumber daya pesisir (studi kasus di perairan segara anakan, Kabupaten Cilacap). *Jurnal Bijak dan Riset Sosek Kelautan dan Perikanan*, 5(1), 31–46. doi:10.15578/jsekp.v5i1.5790
- Wei, Y., Zhong, F., Song, X., & Huang, C. (2023). Exploring the impact of poverty on the sustainable development goals: Inhibiting synergies and magnifying trade-offs. *Sustainable Cities and Society*, 89(2023), 104367. doi:10.1016/j.scs.2022.104367
- Yulitasari, Y., & Tyas, W. P. (2020). Dana desa dan status desa di provinsi Jawa Tengah. *Journal of Regional and Rural Development Planning*, 4(2), 74–83. doi:10.29244/jp2wd.2020.4.2.74-83